



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME

Jabatan : Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Pangan Olahan

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dalam penerapan CPPOB oleh UMKM	01 - Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	74 Persen
2.	02 - Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	01 - Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	73 Kab/Kota
		02 - Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	88 Persen
3.	03 - Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pangan olahan	01 - Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	80 Persen
		02 - Tingkat efektivitas KIE Pangan Olahan	86.42 Nilai
4.	04 - Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar	01 - Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar	28 Kab/Kota
5.	05 - Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat PMPUPO	4.7 Nilai
6.	06 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	100 Nilai
		02 - Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92.3 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	100 Persen
		04 - Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3.6 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 17.367.797.000 (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3.660.360.000
2.	DR.4132 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	13.707.437.000

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Pangan Olahan



Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan



Dra. Elin Herlina, Apt, MP